

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. (2004). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*. (2004). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. (2003). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. (2010). Jakarta.
- Bawono, I.R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan danpertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD (pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Feriyanti, M., Hermanto., & Suransi N.K. (2015). 'Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah: studi pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat'. *Jurnal Infestasi*. Vol. 11 No. 2, Desember 2015, hlm. 171-185.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. & Chariri, A. (2014). *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi: akuntansi sektor publik*, edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani. (2016). *Good corporate governance*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harahap, S. S. (2012). *Teori akuntansi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Heriningsih, S. & Ruserlistyani. (2013). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 13 No. 2, September 2013, hlm. 11-19.
- Hendriyani, R & Tahar, A. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia'. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22 No. 1, hlm. 25-33.
- Hilmi, A.Z. & Martani, D. (2012). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi'.
- Khasanah, N. L. & Rahardjo, S. N. (2014). 'Pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah'. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3 No. 3, hlm. 1-11.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*, Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martani, D., & Lestiani, A. (2012). 'Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia'. *Global Review of Accounting and Finance*, Vol. 3.No. 1. March 2012, page. 67-84.
- Maulana, C. & Handayani, B. D. (2015). 'Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD'. *Accounting Analysis Journal 4 (4)*, ISSN 2252-6765, hlm. 1-11.

- Nordiawan, D., Putra, I.S., & Rahmawati, M., (2007). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patrick, P.A. (2007). 'The determinants of organizational innovativeness: the adoption of gasb 34 in pennsylvania local government'.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*. Vol. 2, No. 1, juni 2007, hlm. 37-46.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Robbins, W. A., & Austin, K. (1986). 'Disclosure quality in governmental financial reports: an assessment of the appropriateness of compound measure'. *Journal of Accounting Research*, Vol. 24, No. 2 (Autumn, 1986), page. 412-421.
- Sarwono, J. (2015). *Rumus-rumus populer dalam SPSS 22 untuk riset skripsi*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, D. & Syafitri, F. (2012). 'Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan'. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No. 2, Desember 2012, hlm. 154-170.
- Sitagang, J.P. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D. & Yulianingtyas, R.R. (2011). 'Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah: studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia'. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 1, November 2011, hlm. 30-42.
- Suwardjono. (2010). *Teori akuntansi perikayasaan pelaporan keuangan*, edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Tanjung, A. H. (2012). *Akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual*. Bandung: Alfabeta.
- Waliiyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). 'Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journa 4 (2)*, ISSN 2252-6765, hlm. 1-8.